

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem

Ni Komang Ayu Mahartini¹

Anik Yuesti²

I Made Sudiartana³

Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : ayuikomang@gmail.com

Abstrak

Laporan keuangan adalah suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja keuangan perusahaan. Kualitas laporan keuangan harus memenuhi nilai karakteristik yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Sampel dalam penelitian ini adalah 87 orang pegawai dalam OPD Kabupaten Karangasem yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan variabel sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: kualitas laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan sistem informasi akuntansi.

PENDAHULUAN

Di era reformasi ini, terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Tidak hanya di pemerintah pusat, pemerintah daerah pun diharapkan dapat mewujudkan kinerja yang baik. Dalam mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang baik, pemerintah daerah harus terus melakukan upaya perbaikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya dapat berguna bagi para pengguna atau *stakeholder*, terutama transparansi kepada masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perusahaan dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi. Kualitas informasi dalam laporan keuangan perusahaan tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi. Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur (Wijayanti, 2017).

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Terdapat empat karakteristik kualitas laporan keuangan menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Karakteristik tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat di pahami.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang disusun dengan menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang

berkualitas. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik juga dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Intern (SPI). Sistem Pengendalian Intern (SPI) berfungsi memberikan keyakinan tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi, dan memudahkan proses audit laporan keuangan. Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internalnya. Jika pengendalian internal lemah, maka akan sulit mendeteksi kecurangan proses akuntansi sehingga dapat menyebabkan bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi tersebut menjadi tidak relevan. (Herawati, 2014).

Kemudian dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Pemanfaatan teknologi dalam aplikasi komputer akuntansi pada pemerintah daerah sangat penting dalam membantu aparatur pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan sehingga lebih efektif, efisien, dan ekonomis.

Provinsi Bali merupakan daerah yang mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Ini berarti Laporan Keuangan Daerah Provinsi Bali disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku. Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, tidak menjamin bahwa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan bebas dari kecurangan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karangasem selama 8 (delapan) tahun terakhir ternyata pada tahun 2010 Kabupaten Karangasem pernah mendapat opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat) yang artinya tidak ada opini yang diberikan oleh BPK-RI. Opini ini diberikan auditor apabila laporan keuangan tersebut wajar atau tidak. Dalam hal ini laporan keuangan Kabupaten Karangasem masih memerlukan banyak perbaikan dalam hal penyusunannya. Menindaklanjuti hasil dari temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tersebut, maka perlu dikaji secara mendalam pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.

Fenomena yang terjadi menurut hasil dari pemeriksaan BPK RI yang di laporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2016 diketahui bahwa Kabupaten Karangasem mengalami permasalahan utama yaitu mengenai ketidakpatuhan terhadap Perundang-Undangan atas kelemahan pengelolaan keuangan desa, yaitu BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran atas ketidaksesuaian harga material pada bukti pertanggungjawaban dengan hasil konfirmasi harga sebesar Rp37,97 juta dan kekurangan volume pekerjaan pada 5 desa sebesar Rp 47,98 juta, serta adanya kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) yaitu dalam Penyusunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) RPJM Desa, (Rencana Kerja Pembangunan) RKP Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa belum tertib, diantaranya pemerintah desa tidak menetapkan RKP desa melalui peraturan desa dan menyusun RKP desa setelah APB Desa.

Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah telah banyak dilakukan. Penelitian ini terpacu pada penelitian yang dilakukan oleh Munasyir (2015) yaitu tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Triyani (2018) tentang Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas serta melihat dari fenomena yang terjadi tentang rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem yang dibuktikan dengan adanya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem”.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kegunaan Keputusan (*Decision Usefulness Theory*)

Teori kegunaan keputusan (*decision usefulness theory*) dikemukakan pertama kali pada tahun 1954 dalam disertai dengan judul *An Accounting Concept of Revenue di University of Chicago* Amerika Serikat oleh George J. Staubus. Pada tahap awal, teori ini dikenal dengan nama *A Theory of Accounting to Investors* (Staubus, 2000). Teori ini didasarkan pada permasalahan yang timbul berkenaan dengan konsep akuntansi yang berdasarkan biaya historis, bahwa konsep biaya historis tidak relevan dengan penilaian akuntansi dengan harga pasar atau pendekatan nilai sekarang terhadap harga wajar.

Teori kegunaan keputusan pada informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang harus dipertimbangkan oleh para pembuat informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. Teori kegunaan keputusan mencakup mengenai syarat dari kualitas informasi akuntansi yang berguna dalam keputusan yang akan diambil oleh pengguna. Tujuan akuntansi dikaitkan dengan para pembuat informasi akuntansi yang bertugas menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh para pengambil keputusan ekonomi yang baik. Pihak yang berkepentingan dalam arti para pengguna/pemakai laporan keuangan (Endang, 2011).

Selanjutnya juga mengatakan bahwa sikap manajemen terhadap penerapan suatu standar akuntansi berhubungan dengan kepentingannya terhadap pengungkapan informasi akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk pelaporan keuangan. SFAC No 2 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer dan kualitas sekunder. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan (*relevance*) dan reliabilitas (*reliability*). FASB menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Nilai relevan diklasifikasikan sebagai kapasitas informasi untuk membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai. Reliabilitas didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi itu secara rasional bebas dari kesalahan, dan mewakili apa yang akan digambarkan.

Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya penerapan standar akuntansi untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas. Sistem informasi akuntansi memungkinkan untuk mendukung kegiatan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Adanya efektifitas penerapan sistem informasi akuntansi maka dapat disajikan suatu data atau informasi secara efektif sehingga memudahkan untuk penyusunan laporan keuangan. Penggunaan sistem pengendalian intern yang baik, dapat mempermudah atau mempercepat penyusunan laporan keuangan karena perangkapan tugas tidak terjadi lagi. Kualitas laporan keuangan berguna dalam pengambilan keputusan sehingga mencakup sesuai standar akuntansi yang meliputi nilai relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh pengguna atau pemakai informasi tersebut.

Pemerintah dituntut untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara baik. Dimana pemerintah harus mengarahkan semua kompetensi dan kemampuan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan asil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dana (Ikatan Akuntan Indonesia, 2002:4). Adapun karakteristik kualitas suatu laporan keuangan adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP No. 71 tahun 2010). Untuk itu dibutuhkan pengendalian intern sebagai media dalam mencapai hal tersebut.

Sistem pengendalian intern adalah suatu sistem yang meliputi struktur organisasi, cara-cara dan alat-alat yang dikoordinasikan di dalam perusahaan untuk menjaga keamanan harta (*asset*) milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mengoptimalkan efisiensi operasional, serta meningkatkan pelaksanaan kegiatan manajemen yang telah ditetapkan (Mulyadi, 2001:160).

Pengendalian intern disusun agar pelaporan keuangan dapat memenuhi asas ketertiban yang merupakan cerminan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan umum dari pengendalian intern yaitu efisiensi dan efektivitas operasi. Salah satu unsur pokok sistem pengendalian intern adalah struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Dengan adanya penerapan sistem pengendalian intern diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Sitem informasi akuntansi berperan penting dalam menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan. Dimana sistem informasi akuntansi dirancang untuk menghasilkan informasi berupa informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak ekstern maupun intern perusahaan. Sistem informasi akuntansi pada dasarnya dapat dioperasikan tanpa menggunakan komputer, akan tetapi keterlibatan komputer dalam menangani tugas-tugas manusia dalam suatu sistem memiliki peran yang sangat besar dan menunjang kelancaran sebuah sistem, sehingga informasi sangat dibutuhkan pihak manajemen untuk dalam disajikan dengan cepat dan tepat waktu. Perusahaan menggunakan sistem informasi akuntansi dalam mencapai kepuasan manajemen. Kepuasan manajemen erat kaitanya dengan kualitas laporan keuangan yang baik.

Kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurannya, umumnya digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian kompensasi dan persyaratan hutang. Oleh karena itu pemerintah harus menerapkan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Jayanti, 2012). Prinsip tersebut terdiri dari basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi,

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah guna untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Bastian, 2012). Standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Dengan ditetapkannya SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan

dipemerintahkan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas. Manfaat lain yang dapat diperoleh dengan adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan menyeluruh kepada *stakeholders*. Selain itu dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antar generasi dimana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan (Fakhrurazi, 2010)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arief (2016), Udiyanti (2014), dan Ratnasari (2018) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Pengendalian intern adalah alat ukur untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan pengendalian manajemen akan tercapai (Setiyawati, 2013). Sistem pengendalian intern diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah dengan tujuan dari pengendalian intern diterapkan yaitu agar laporan keuangan andal, efisien dan efektif serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Organisasi akan beroperasi secara efektif dan efisien ketika penerapan pengendalian intern berjalan baik dimana pengawasan terhadap kegiatan akuntansi perusahaan dilakukan dengan meningkatkan sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan perusahaan dengan kualitas laporan keuangan yang baik.

Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, SPIP akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai pada instansi pemerintah, akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Akibatnya, tidak akan terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Hal ini dapat dibuktikan, misalnya melalui laporan keuangan pemerintah yang andal dan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian.

Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi sejak dini terjadi kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Munasyir (2015), Nugraheta (2017), dan Novalia (2014) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan dan pengambilan keputusan perusahaan (Mulyadi, 2001:3). Dengan adanya sistem informasi akuntansi ini manajemen perusahaan

dapat melihat keuangan dengan jelas melalui sistem tersebut dan juga manajemen dapat mengontrol kinerja dari sistem yang digunakan. Fungsi utama dari sistem informasi akuntansi ini yaitu mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Informasi ini berbentuk laporan keuangan baik secara manual maupun *online* yang diperlukan oleh semua pihak.

Jika pemerintah menerapkan sistem informasi akuntansi dengan baik, diharapkan semua laporan dapat disajikan tepat waktu. Jadi semua pihak internal maupun eksternal dapat mengambil keputusan dengan baik mengenai perkembangan organisasi. Penggunaan SIA yang efektif akan membantu perkembangan organisasi dalam jangka waktu yang panjang. Untuk mendukung sebuah usaha yang baik tentunya butuh sistem pencatatan dan pelaporan yang baik pula. Jurnal *software* akuntansi *platform* penyedia layanan akuntansi online dapat memenuhi hal tersebut. Dengan memilih menggunakan jurnal sebagai dukungan dalam mengelola pencatatan keuangan daerah, maka secara tidak langsung organisasi akan memiliki sistem informasi akuntansi yang tertata dengan rapi dan kredibel yang dapat digunakan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Triyani (2018), Pujanira (2017), Saipullah (2017) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karangasem. Obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti (Supranto 2000:21). Adapun obyek penelitian dalam penelitian ini meliputi : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:117). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD se Kabupaten Karangasem yang berjumlah 1292. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 1. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2016:118). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *non-probability sampling*, dengan teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:124). Populasi yang akan dijadikan sampel adalah populasi yang memenuhi yang akan dipakai dalam pengambilan sampel. Kriteria pengambilan sampel yang digunakan adalah :

1. Pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem
2. Pegawai yang telah menduduki jabatan sebagai kepala dinas.
3. Pegawai yang memiliki peran dalam penyusunan laporan keuangan/ anggaran.

Proses pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tampak dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Penentuan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem	1.292
2	Pegawai yang tidak menduduki jabatan sebagai kepala dinas	(870)

3	Pegawai yang tidak memiliki peran dalam penyusunan laporan keuangan atau anggaran.	(335)
	Jumlah sampel	87

Sumber: Data diolah (2019)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membagikan kuesioner yang akan diisi atau dijawab oleh responden karyawan. Kuesioner juga dilengkapi dengan petunjuk pengisian yang sederhana dan jelas untuk membantu responden melakukan pengisian dengan lengkap.

Peneliti juga melakukan metode tinjauan kepustakaan. Metode tinjauan kepustakaan yang dilakukan yaitu dengan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis pada buku-buku, makalah, dan jurnal guna memperoleh landasan teoritis yang memadai untuk melakukan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, maka digunakan analisis statistik regresi linier berganda, Uji t dan Uji F. Analisis tersebut diolah dengan program computer, yaitu *Statistical Package for Social Science (SPSS)*. Hasil dari analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	15.464	3.042		5.084	.000
1 PSAP	.004	.098	.004	.042	.966
SPI	-.078	.088	-.099	-.887	.378
SIA	.342	.109	.353	3.136	.002

Sumber : data diolah (2019)

Berdasarkan tabel 5.9 maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :
 $KLK = 15.464 + 0,004(PSAP) + -0,078(SPI) + 0,342(SIA)$

Berdasarkan persamaan tersebut, maka pengaruh variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 15.464 mengandung arti jika variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi bernilai 0 (nol), maka kualitas laporan keuangan sama dengan 15.464.
- 2) Variabel sistem informasi akuntansi meningkat 1 satuan, maka akan mengakibatkan peningkatan pada kualitas laporan keuangan sebesar 0,342 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,004 dengan tingkat signifikansi variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 0,966 lebih besar dari

0,05. Hal ini berarti variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Karangasem, sehingga H_1 ditolak.

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, dalam dunia akuntansi ada beberapa standar akuntansi yang dapat dipakai dalam membuat laporan keuangan, diantaranya SAK (Standar Akuntansi Keuangan), IFRS (Standar Pelaporan Keuangan Internasional), dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada penerapannya, hasil laporan keuangan yang dibuat berdasarkan standar akuntansi pemerintahan tidak mempunyai perbedaan yang cukup berarti dengan standar akuntansi pada umumnya. Selain itu hampir semua standar akuntansi baik itu SAK, IFRS, maupun Standar Akuntansi Pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pasha (2018) dan Nugroho(2018) yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,078 dengan tingkat signifikansi variabel sistem pengendalian intern sebesar 0,378 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti variabel sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, pemerintah Kabupaten Karangasem, sehingga H_2 ditolak.

SPI secara lengkap dan menyeluruh terhadap sistem akuntansi tidak mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. Penerapan SPI secara lengkap dan menyeluruh belum sepenuhnya mengurangi pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi. Di dalam pelaksanaan SPI secara terus menerus setiap hasil temuan belum tentu dapat mendeteksi kecurangan dalam proses akuntansi, sehingga menyebabkan bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi tersebut menjadi tidak relevan. Dengan demikian SPI tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya dinilai dari efektifitas pengendalian intern saja, sehingga aparatur pemerintah harus mampu memenuhi aspek-aspek lain untuk menghasilkan laporan keuangan yang dinilai berkualitas. Aspek-aspek tersebut diantaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pasha (2018) dan Narotama (2018) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,342 dengan tingkat signifikansi variabel sistem informasi akuntansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti variabel sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten karangasem, sehingga H_3 diterima.

Sistem informasi akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan dan pengambilan keputusan. Sehingga untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai dengan yang diharapkan memerlukan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. Dengan demikian semakin baik sistem informasi akuntansi yang digunakan maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Selain itu dengan adanya penerapan sistem informasi akuntansi diharapkan semua laporan dapat disajikan secara tepat waktu.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Triyani (2018), dan Pujanira (2017) yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten karangasem, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan penerapan standar akuntansi pemerintahan itu tidak mempunyai perbedaan dengan standar akuntansi pada umumnya seperti SAK dan IFRS, jadi ada atau tidaknya penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak akan memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- 2) Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan SPI, setiap hasil temuan belum tentu dapat mendeteksi kecurangan dalam proses akuntansi sehingga menyebabkan bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi tersebut menjadi tidak relevan. Dengan demikian sistem pengendalian intern tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- 3) Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik sistem informasi akuntansi yang diterapkan maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan semakin baik pula.

Penelitian ini tidak lepas dari beberapa keterbatasan yang nantinya dapat disempurnakan oleh penelitian selanjutnya, semoga saran-saran dalam penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Adapun saran penelitian ini yaitu :

- 1) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lain yang belum diteliti pada penelitian ini agar dapat mengetahui faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti kompetensi sumber daya manusia, gaya kepemimpinan, dan komitmen organisasi.
- 2) Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan menggunakan metode pengumpulan data yang lain seperti wawancara supaya responden lebih memahami pernyataan koisioner oleh peneliti sehingga mendapatkan kejujuran jawaban responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Adisasmata, Rahardjo. 2013. *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Azhar, Susanto. 2018. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Gramedia.
- Calista, Fedora. 2014. Pengaruh Implementasi *Enterprise Resource Planning* (ERP) Terhadap Kualitas Informasi Pada PT Otsuka Indonesia.
- Endang Kiswara. 2011. Nilai Relevan dan Reliabilitas Kegunaan Keputusan Informasi Akuntansi menurut SFAC No.2 dalam Penyajian Laporan Keuangan dengan Metode-Metode Pembebanan Pajak Penghasilan Berbeda. *Disertai* dipublikasi, Universitas Diponegoro.
- Fakhrurazi. 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. *Jurnal*. Akuntansi

- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* Edisi Kedelapan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herawati, Tuti. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Bandung.
- Herman. 2015. Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Kabupaten Jeneponto). *Tesis*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hassanuddin, Makasar.
- Hardyansyah. 2016. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Polewali Mandar). *Jurnal*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2009. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Ihsanti, Emilda. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2000. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat. Jakarta.
- Supranto, J. 2000. *Statistik Teori dan Aplikasi* Edisi Keenam, Jakarta, Erlangga.
- Kusuma, Riris Setiawati. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. *Skripsi*. Universitas Jember.
- Pramesti, I. G. A. A., Endiana, I. D. M., & Ardilia, D. P. D. (2021, November). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa. In *Widyagama National Conference on Economics and Business (WNCEB)* (Vol. 2, No. 1, pp. 309-324).